

## DAFTAR PUSTAKA

- Abyasa, Teguh. (2021). "Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Mencapai Good Governance Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pematangsiantar)". *Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum*. Medan : Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Anggoro, Dwi Wahyu Aris Setio. (2017). "Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen". *Skripsi pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Semarang: FISIP UNNES.
- Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, (2022). <https://bukittinggikota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>. Diakses pada 21 agustus 2022
- Datamora Sandro dan Hasbullah Malau. (2019). "Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Untuk Masyarakat di Kota Padang", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1(4) : 138.
- Dadang Suwanda, Wirman Syafri, Tjahya Supriatna. (2021). *Mal Pelayanan Publik Percepatan Peningkatan Kualitas Dan Inovasi Layanan Masyarakat*. (Pt Remaja Rosdakarya).
- Dinata, Fikri Akbar. (2022). "Reformasi Birokrasi Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukittinggi". Senin, 12 September 2022, Pukul 10:05 WIB
- Djam'an, Satori. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Efendi, Syaiful. (2022). "Reformasi Birokrasi Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukittinggi". Selasa, 13 September 2022, Pukul 10:45 WIB
- Faizia, Silmy. (2022). "Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat". *Doctoral dissertation*, FISIP UNPAS : 12.
- Febriana, Puryatama Arnita. (2020). "Nur Haryani Tiyas, Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Indonesia". *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1) : 47.
- Kurniati, Loly. (2022). "Reformasi Birokrasi Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukittinggi". Senin, 12 September 2022, Pukul 14:00 WIB

- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset, Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia*, Yogyakarta.
- Mal Pelayanan Publik. (2022). [www.mpp.bukittinggikota.go.id](http://www.mpp.bukittinggikota.go.id). Diakses pada 21 agustus 2022
- Moenek Reydonnyzar, Suwanda Dadang. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Moh. Nasir. (1999). *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Nurdiansyah Nurdin, Wahyu (2013). “Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar)”. *Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin : 23.
- Nurmantias, Ramlan. (2022). “ *Reformasi Birokrasi Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukittinggi*”. Senin, 5 September 2022, Pukul 16:29 WIB
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2006.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 92 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1.
- Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. (2022). <http://www.bukittinggikota.go.id>. Diakses pada 21 agustus 2022
- Putri, Anya Risnawati. (2018). “Koordinasi Pemangku Kepentingan Dalam Meningkatkan Strategi Pengembangan Destination Management Organization (DMO) di Pangandaran (Studi pada Disparperindagkop UMKM dan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)”. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* :19-33.
- Raffi Farhan A, Margareta Fictera, Dewanti Shinta. (2020). “Upaya Dalam Mewujudkan GoodGovernance Melalui Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penerapan Konsep Smart City di Kota Batu Berbasis Tekonologi)”. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0.* : 812.

- Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan publik bagi pemenuhan hak-hak disabilitas di Kota Yogyakarta. *NATAPRAJA*, 1(1).
- Redaksi. (2021). Mal Pelayanan Publik Bukittinggi Mulai Beroperasi, Ratusan Pelayanan Izin Kini Satu Tempat, <https://langgam.id/mall-pelayanan-publik-bukittinggi-mulai-beroperasi-ratusan-pelayanan-izin-kini-satu-tempat/>. Diakses pada 18 Maret 2021
- Rebecca, Sutton. (1999). Proses Kebijakan: Gambaran, *Overseas Development Institute*.
- Riyadi, Kharisma. (2021). “Implementasi Elemen Interior Informatif dan Atraktif Terhadap Kesetaraan Pengguna Mal Pelayanan Publik Kab. Brebes”. *Jurnal Pengetahuan & Perancangan Desain Interior*, (2) : 817.
- Rizki Mahardita Hayuning. (2017). “Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur”. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5 (1) : 135.
- Sesmidia, Elfa. (2022). “Reformasi Birokrasi Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukittinggi”. Senin, 12 September 2022, Pukul 09:00 WIB
- Soleh Ahmad, Iwan Eka Putra, Yunie Rahayu. (2017). “Analisis Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik Sebagai Dasar Menuju Reformasi Birokrasi Yang Ideal (Study Kasus Pemerintah Kota Jambi)”. *Jurnal Development*, 5(2) : 110.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Siti Maryam, Neneng. (2016). “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6 (1) : 1.
- Statistik Pengunjung Mal Pelayanan Publik. (2022). [www.mpp.bukittinggikota.go.id](http://www.mpp.bukittinggikota.go.id). Diakses pada 21 agustus 2022
- Tillah, Mardha. (2022). “Reformasi Birokrasi Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukittinggi”. Kamis, 8 September 2022, Pukul 13:35 WIB
- Parisi Wakanno, Topan. (2022). Pengaruh Kenyamanan Berbelanja, Kualitas Pelayanan dan Kelengkapan Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Indomaret. *Skripsi Pada Jurusan Ilmu Ekonomi*.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah
- Wahab, Abdul. (2001). “Globalisasi dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Governance”. *Jurnal Administrasi Negara*, II (1): 43.

- Wahidi, Adel. (2022). *“Reformasi Birokrasi Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukittinggi”*. Jumat, 16 September 2022, Pukul 09:20 WIB
- Wiratna, Sujarweni V. (2014). *Metodologi Penelitian lengkap, praktis, dan mudah karta*: Pustaka Baru Press).
- Yanti, Bendi Yuni. (2022). *“Reformasi Birokrasi Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bukittinggi”*. Kamis, 8 September 2022, Pukul 11:27 WIB
- Yoakim Antonius Mali. (2019). "Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)." *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* : 56-72.
- Yusriadi, Misnawati. (2017). *“Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 7 (2) : 100.
- Yusuf Patta Andi, Ibrahim Akmal, Syahrubulan. (2019). *“Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Maros”*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. VIII (1) : 13.
- Yusuf, Fitria Melynsyah, Yuwin Ali, and Sariyanti P. Bouti. (2021). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula." *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*. 4.(2) : 78.
- Yulman. (2019). Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dan Menpan RB Syafruddin Tandatangani Komitmen Pembangunan MAL Pelayanan Publik,. <http://bukittinggikota.go.id/berita/walikota-bukittinggi-ramlan-nurmatias-dan-menpan-rb-syafruddin-tandatangani-komitmen-pembangunan-mal-pelayanan-publik>. Diakses pada 18 Maret 2021
- Yulman. (2019). Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Bukittinggi Bangun Mal Pelayanan Publik, <http://bukittinggikota.go.id/berita/tingkatkan-kualitas-layanan-publik-bukittinggi-bangun-mal-pelayanan-publik>. Diakses pada 18 Maret 2021